

EDITOR:

Lindrianasari
Susi Sarumpaet

AKUNTANSI

**Sebuah Kajian Terhadap Kebijakan
Perusahaan dan Pemerintah**



AKUNTANSI; Sebuah Kajian Terhadap Kebijakan Perusahaan dan Pemerintah

oleh Ganjar Asdi Sudrajat; Ratna Septiyanti; Yuztitya Asmaranti; Muhammad Sidiq; Lindrianasari; Marselina; Meryza Purnama; Rindu Rika Gamayuni; Yunia Amelia; M. Elly Candrawati; Susi Sarumpaet; Fitra Dharma; Hafin Jaya Wardana; Niken Kusumawardani; Endie Evana; Wuri Astuti Hanafi; Dewi Sukmasari; Sudrajat.

Editor: Lindrianasari; Susi Sarumpaet

Hak Cipta © 2019 pada penulis

Edisi Pertama: Cetakan I ~ 2019



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283
Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-228-067-0

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

DATA BUKU:

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xiv + 146; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW/Colour;
Kertas Cover: Ivori 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding; Laminasi Doff.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Bab 1 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja oleh: Ganjar Asdi Sudrajat, Ratna Septiyanti, Yuztitya Asmaranti	1
1.1 Pendahuluan	2
1.2 Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis	4
1.3 Metode Penelitian	10
1.4 Hasil dan Pembahasan	13
1.5 Simpulan dan Saran	19
1.6 Daftar Pustaka	20
Bab 2 Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia oleh: Muhammad Sidiq, Lindrianasari, Fitra Darma, Marselina	25
2.1 Pendahuluan	26
2.2 Landasan Teori	30
2.3 Metode Penelitian	33
2.4 Hasil Penelitian	39
2.5 Pengujian Hipotesis	48

Bab 1

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja

¹Ganjar Asdi Sudrajat, ²Ratna Septiyanti^{*}, ³Yuztitya Asmaranti,
1.2.3. Accounting Department, University of Lampung
^{*}email: rseptiyanti@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effect of local government's characteristics to the accountability of local government's performance. The characteristics of local government as independent variables consist of the size of local government, financial independence, governmental spending, and the size of the legislature as variables. The accountability performance as the dependent variable is measured by the result of accountability performance published by Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. By using multiple regression analysis on 420 samples of local government regency/city in Indonesia for year 2015, the result shows that the financial independence of local government and size of legislature have positive and significant effect on the accountability of local government's performance, while the size of local government and governmental spending have no significant effect on the accountability of local government's performance.

Keywords: Characteristic of local government, the accountability performance, bureaucratic reform, local government's performance accountability report (LAKIP), local government's performance accountability system (SAKIP)

1.1 Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah harus diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan aspek-aspek kekhasan suatu daerah. Pemerintahan yang efektif dan efisien harus didukung dengan penerapan reformasi birokrasi yang baik. Pembentahan keorganisasian, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya undang-undang dan reformasi birokrasi tersebut menuntut komitmen pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengelola potensi daerahnya dengan baik serta menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi wewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan *good governance*, pemerintah daerah mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan melakukan penguatan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Setiap pemerintah daerah harus menerapkan SAKIP dan melaporkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai pihak yang bertugas melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dikelompokkan dalam 7 kategori, yaitu kategori AA (sangat memuaskan), A (memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup), C (kurang), dan D (sangat kurang) (Kemenpan-RB, 2015). Pelaksanaan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah beberapa kali dilakukan. Namun, kenyataannya

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masih belum dapat mencapai hasil kinerja yang memuaskan.

Berdasarkan data hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kemenpan-RB, diketahui bahwa dari total 504 (100%) pemerintah kabupaten/kota, bahkan belum terdapat daerah yang memperoleh kategori AA dan hanya 1 daerah (0,19%) yang memperoleh kategori A. Sedangkan yang memperoleh kategori BB sebanyak 7 daerah (1,39%), B sebanyak 30 daerah (5,95%), CC sebanyak 168 daerah (33,33%), C sebanyak 231 daerah (45,83%), dan untuk kategori D sebanyak 67 daerah (13,29%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya capaian akuntabilitas kinerja tentu perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Penelitian mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang dapat memengaruhi capaian kinerja pemerintah daerah. Salah satu faktor yang dapat dikaitkan adalah karakteristik pemerintah daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah yaitu ciri khusus pada pemerintah daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Karakteristik pemerintah daerah dapat dilihat dari segi ukuran daerah, kekayaan, belanja daerah, maupun ukuran legislatif. Penelitian yang terkait dengan hubungan antara karakteristik pemerintah daerah dengan kinerja pemerintah daerah telah beberapa kali dilakukan, antara lain oleh Afrian (2016) yang menghubungkan karakteristik pemerintah daerah, temuan audit (BPK), dan leverage terhadap kinerja pemerintah daerah. Nurdin (2015) menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Setyaningrum dan Syafitri (2012) menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah berupa umur, kekayaan, *intergovernmental revenue*, ukuran pemda, diferensial fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan dan ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Selain itu, penelitian lain dilakukan oleh